

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan total lebih dari 17.000 pulau yang memiliki garis pantai sepanjang 180.000 kilometer dan memiliki area laut yang luas dibandingkan negara lainnya (KKP RI, 2024). Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis bagi perdagangan dunia sebagai penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Karena itu, Indonesia memiliki potensi yang menyeluruh, tidak hanya nilai ekonomi dan ekologi, namun juga mencakup aspek politik, sosial, dan keamanan yang sangat krusial.

Sebagai negara kepulauan yang membujur dari Sabang (Aceh) hingga ke Merauke dengan mayoritas wilayah yang dua per tiga dari keseluruhan teritori berupa lautan dan memiliki batas darat dan laut terhadap wilayah (negara) lain didunia, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk memantapkan posisinya sebagai kekuatan maritim. Melihat banyaknya potensi besar yang bisa dimanfaatkan disektor maritim ini kemudian melatarbelakangi pemerintah Indonesia dalam merumuskan Poros Maritim Dunia (PMD), sebuah strategi nasional untuk mengembalikan identitas kemaritimanan Indonesia. Gagasan Poros Maritim Dunia tidak muncul secara tiba-tiba, Indonesia telah sejak lama melakukan

perdagangan dengan dunia luar melalui pelayaran laut yang dimulai oleh kerajaan kerajaan Nusantara.

Sejarah kejayaan bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan bahari sudah sejak lama dikenal. Aktivitas pelayaran bangsa Indonesia sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang dan sejalan dengan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan Nusantara Indonesia terletak pada persilangan jaringan lalu lintas laut dunia, dan secara tidak langsung merupakan penghubung antara dunia Barat, Tengah dan Timur. Berbagai hasil bumi yang berasal dari bangsa Indonesia merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh pasaran dunia terutama di Eropa. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya aktivitas perdagangan dan pelayaran yang ramai dari dan ke Indonesia (Dr. Ir. Avando Bastari, 2021)

Secara historis, identitas Indonesia sebagai bangsa maritim telah terbentuk sejak masa kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, yang menjadikan laut sebagai ruang utama perdagangan, diplomasi, dan integrasi wilayah (Reni & Mokodompit, 2024). Sejak masa kerajaan-kerajaan maritim awal seperti Sriwijaya (abad ke-7–13), wilayah Nusantara telah dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelayaran internasional yang menghubungkan jalur perdagangan India–Tiongkok. Kerajaan Sriwijaya membangun kekuatan maritim berbasis penguasaan jalur laut, diplomasi perdagangan, serta kemampuan mengelola wilayah perairan strategis di Selat Malaka sebagai pusat konektivitas regional (Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, 2023). Kejayaan maritim Nusantara berlanjut pada masa Kerajaan Majapahit (abad ke- 13–15) yang tidak hanya mengandalkan kekuatan darat, tetapi

juga armada laut yang kuat untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperluas pengaruh politiknya di Asia Tenggara. Konsep persatuan wilayah Nusantara yang dicetuskan melalui Sumpah Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada menunjukkan bahwa laut dipandang sebagai pemersatu wilayah, bukan pemisah antar pulau (Adinda Rahma Pinandita, 2024).

Namun, orientasi pembangunan Indonesia pasca-kemerdekaan cenderung bergeser ke arah daratan (*land-based development*), sehingga identitas maritim yang sebelumnya menjadi kekuatan utama bangsa mengalami degradasi secara struktural dan kultural. Kondisi ini mendorong munculnya kembali gagasan untuk menjadikan laut sebagai pusat pembangunan nasional melalui visi Poros Maritim Dunia yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 yang dipahami sebagai upaya rekonstruksi kesadaran maritim nasional yang berbasis sejarah, geopolitik, dan kepentingan nasional kontemporer.

Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan konsep yang diajukan Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014 (Harun, 2020). Konsep ini menekankan 5 (lima) pilar utama. Pilar pertama dalam strategi Poros Maritim Dunia berfokus pada upaya pembentukan dan penguatan budaya maritim. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa Indonesia secara historis merupakan bangsa yang tumbuh dan berkembang dari tradisi kemaritiman (Manggala, 2025). Indonesia perlu mendorong peningkatan aktivitas dan kegiatan ekonomi berbasis kelautan agar upaya pemulihan jati diri bangsa dapat terwujud dan sekaligus menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pilar kedua yaitu pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan maritim untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2023). Potensi sumber daya maritim tersebut harus dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, melindunginya dari berbagai ancaman eksternal melalui penguatan kedaulatan laut, serta mendorong pengembangan sektor perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai fondasi utama industri maritim nasional.

Pada pilar ketiga ini, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan sistem konektivitas maritim, seperti membangun tol laut, pelabuhan, sistem logistik, sektor perkapalan, serta industri pariwisata laut (Harun, 2020). Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau, Indonesia memerlukan sistem konektivitas yang kuat antarpulau dan antardaerah, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur maritim guna mengintegrasikan wilayah-wilayah Indonesia yang terpisah oleh laut.

Pada pilar keempat, Indonesia memilih diplomasi maritim sebagai strategi inovatif dan modern untuk membangun kerjasama internasional dengan negara-negara mitra yang berfokus pada bidang kelautan. Diplomasi maritim merujuk pada penggunaan instrumen diplomatik untuk mencapai kepentingan nasional di bidang kelautan yang mencakup peran aktif Indonesia dalam forum internasional, kerjasama bilateral dan multilateral, serta diplomasi pertahanan yang berorientasi

pada keamanan maritim (Ras, 2025). Untuk mendukung pelaksanaan diplomasi maritim ini, Indonesia terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana dibidang kemaritiman, termasuk mengembangkan sumber daya manusia seperti nelayan dan masyarakat pesisir.

Pilar terakhir PMD, menempatkan Indonesia pada tanggung jawab strategis untuk menjaga dan memperkuat kapabilitas maritimnya secara optimal. Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit dua samudera serta memiliki kekayaan akan sumber daya laut yang melimpah. Perlu bagi Indonesia untuk membangun kekuatan pertahanan maritim guna menghadapi berbagai masalah seperti pencurian sumber daya alam oleh negara lain, perompakan, terorisme, perdagangan manusia ilegal, dan sengketa perbatasan (Perwita et al., 2025). Peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun penyediaan sarana pertahanan yang memadai yang ditopang oleh kemandirian industri pertahanan nasional.

Di antara kelima pilar tersebut, diplomasi maritim menjadi instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global melalui kerja sama kelautan, pengelolaan perbatasan laut, serta penguatan hubungan dengan negara- negara tetangga. Diplomasi maritim tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor subnasional, khususnya di wilayah perbatasan. Sebagai implikasi dari posisi Indonesia yang sangat strategis, perairan Indonesia memiliki arti penting bagi masyarakat dunia pengguna laut. Jika bangsa Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dengan baik, tentunya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Jika bangsa Indonesia tidak bisa mengantisipasi dan mengelola masalah

serta resiko yang timbul, maka akan berdampak terhadap keamanan dan bahkan kedaulatan negara.

Dalam konteks ini, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan maritim yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, merupakan dua *choke points* perdagangan global yang berbatasan langsung dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam (Nursafitri & Ramadhan, 2022). Sebagian besar wilayah Kepulauan Riau berupa lautan, sehingga menjadikannya sebagai salah satu garda terdepan Indonesia dalam implementasi diplomasi maritim. Keberadaan infrastruktur perbatasan seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan di Natuna serta diplomasi maritim yang dilakukan melalui kerja sama lintas batas seperti Sosek Malindo dan IMT-GT, semakin menegaskan peran Kepulauan Riau sebagai representasi kehadiran negara di kawasan perbatasan laut untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki posisi strategis yang sangat vital dalam mendukung visi tersebut. Kepri memiliki luas wilayah sebesar 251.810 km², di mana 96% berupa lautan dan hanya 4% berupa daratan. Wilayah ini terdiri dari 2.408 pulau (Lovina, 2022a). Kondisi ini menuntut pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif, tidak hanya dalam aspek keamanan dan kedaulatan, tetapi juga dalam diplomasi maritim yang melibatkan kerja sama lintas negara (Maisondra & Timur, 2023). Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 (tujuh) daerah administratif yang meliputi 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan

Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun menjadi kawasan terdepan yang berbatasan langsung dengan perairan internasional maupun negara lain.

Dari aspek sosial-ekonomi, kawasan perbatasan di Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pengelolaan ekonomi berbasis perbatasan, seperti melalui pengembangan sektor pariwisata bahari, perikanan tangkap, dan pusat pengembangan nelayan (Maisondra & Timur, 2023). Pengembangan wisata bahari di Bintan dan Anambas, berorientasi pada pasar wisata mancanegara, khususnya Singapura dan Malaysia. Sementara itu, Kabupaten Natuna memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) berbasis perikanan tangkap dan kelautan (Hastuti, 2022). Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya kerjasama ekonomi regional seperti IMT-GT (*Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle*) yang mendorong pertumbuhan lintas batas di sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata (IMT-GT, 2023).

Selain IMT-GT, kerja sama bilateral Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia) juga menjadi platform penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah perbatasan melalui proyek-proyek bersama di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan (Adhe Fadli Farhan et al., 2026). Forum ini mencerminkan bentuk diplomasi fungsional antarwilayah yang memungkinkan daerah seperti Kepulauan Riau untuk berkontribusi langsung dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks diplomasi maritim, kegiatan seperti *Borders Expo* dan Forum Kerja Sama Sosek Malindo

menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan potensi daerah, memperkuat jejaring kerja sama, serta memperluas diplomasi lintas batas.

Namun, pengelolaan kawasan perbatasan hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan ekonomi antar wilayah, serta aktivitas ilegal yang masih sering terjadi baik itu penyelundupan, *illegal fishing*, perdagangan manusia, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (Alfi Maryati, 2025). Menyikapi posisi geografis Indonesia yang strategis, pemerintah berupaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam ketentuan Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, diamanatkan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah guna menangani pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan sebagai bagian integral dari kepentingan nasional (Munir et al., 2020).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) merupakan lembaga pemerintah ditingkat daerah yang diberi kewenangan untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan ditingkat daerah (Mangku, 2018). Secara struktural, BPPD berada di bawah pemerintah daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada gubernur, namun dalam pelaksanaan tugasnya BPPD berkoordinasi secara vertikal dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (BNPP RI, 2023). BPPD tidak hanya berperan dalam

menjaga keutuhan wilayah dan memastikan kesejahteraan masyarakat perbatasan, tetapi juga berperan sebagai aktor lokal yang mendukung diplomasi maritim melalui penguatan kerjasama antarwilayah lintas negara, pengembangan ekonomi maritim secara berkelanjutan, serta pengelolaan isu-isu perbatasan yang bersifat lintas batas.

Dalam ketentuan Pasal 3 UU No 43 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa pengaturan wilayah negara bertujuan untuk: a). Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; b). Menegakkan kedaulatan negara dan hak-hak berdaulat; serta c). Mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya (*UU No. 43 Tahun 2008, n.d.*).

Peran BPPD dalam diplomasi maritim bersifat komplementer terhadap kebijakan luar negeri nasional. BPPD berkontribusi melalui diplomasi ekonomi, diplomasi sosial-budaya, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan maritim. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk menjadi pintu gerbang Indonesia dalam diplomasi maritim. Namun, kontribusi daerah dalam diplomasi maritim seringkali dipandang sebagai peran sekunder dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami sejauh mana Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau berkontribusi dalam konteks visi Poros Maritim Dunia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia. Potensi tersebut tercermin dari upaya peningkatan infrastruktur perbatasan, seperti pembangunan pelabuhan internasional, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta menara suar di titik-titik strategis yang berfungsi sebagai penanda kedaulatan dan keselamatan pelayaran. Kepulauan Riau juga memiliki peluang dalam pengembangan kawasan ekonomi berbasis maritim yang mencakup sektor pariwisata bahari, perikanan, dan perdagangan lintas batas yang berkontribusi terhadap penguatan diplomasi ekonomi maritim (Sandrina & Wira, 2025).

Stabilitas keamanan perairan di wilayah Natuna Utara dan Laut Cina Selatan juga menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas maritim dan kerja sama regional (Sandrina & Wira, 2025). Meskipun aspek pertahanan dan keamanan laut berada dalam kewenangan pemerintah pusat, keberadaan aktor daerah seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) tetap memiliki peran strategis dalam mendukung koordinasi lintas sektor dan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan maritim. Perspektif Kepulauan Riau menawarkan kerangka evaluasi yang komprehensif terkait peran aktor subnasional (*sub-national actors*) dalam mendukung diplomasi luar negeri negara. Melalui sudut pandang ini, analisis tidak hanya berhenti pada tataran normatif kebijakan luar negeri pemerintah pusat, tetapi menelisik ke dalam realitas birokratis daerah termasuk peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dalam menjalankan fungsi diplomasi maritim dan paradiplomasi.

Secara teoretis, studi Hubungan Internasional kontemporer memandang bahwa wilayah perbatasan maritim kepulauan bukan hanya objek pertahanan pasif, melainkan ruang strategis tempat kebijakan luar negeri dan diplomasi publik diterjemahkan ke dalam aksi lokal yang nyata (*glocal approach*). Provinsi Kepulauan Riau dipilih sebagai fokus penelitian karena karakteristik geografisnya yang unik dengan 96% wilayah berupa lautan serta berbatasan langsung dengan negara-negara jiran di jalur pelayaran tersibuk dunia yang menjadikannya laboratorium empiris ideal untuk menguji efektivitas kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Dengan posisi geografis yang sangat strategis, potensi ekonomi yang besar, dan peran penting BPPD dalam mengelola wilayah perbatasan, Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah utama dalam implementasi visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia.

Berdasarkan urgensi teoretis dan empiris mengenai pergeseran paradigma tata kelola perbatasan modern yang tidak lagi berpusat semata-mata pada aktor nasional (*state-centric*), melainkan melibatkan peran aktor subnasional melalui pendekatan paradiplomasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Riau dalam konteks diplomasi maritim menjadi relevan dan memiliki signifikansi yang tinggi guna mengisi kekosongan literatur akademik mengenai sejauh mana instrumen birokrasi daerah mampu bertindak sebagai katalisator diplomasi maritim ekonomi dan keamanan, sekaligus untuk memahami sejauh mana kontribusi dan signifikansi daerah dalam mendukung kepentingan nasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana signifikansi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Riau dalam mendukung diplomasi maritim sebagai bagian dari visi Poros Maritim Dunia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran BPPD Kepulauan Riau dalam pelaksanaan diplomasi maritim?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Untuk mengetahui signifikansi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim sebagai bagian dari visi Poros Maritim Dunia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat peran BPPD Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi maritim, pengelolaan perbatasan, dan peran aktor sub- nasional dalam hubungan internasional.
- b. Menjadi referensi akademik yang dapat memperkaya literatur mengenai implementasi Visi Poros Maritim Dunia dari perspektif daerah, khususnya di kawasan perbatasan maritim.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan bagi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kepulauan Riau dalam memperkuat strategi dan program kerja yang berhubungan dengan diplomasi maritim.
- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat mengenai pentingnya sinergi dalam mengelola wilayah perbatasan sekaligus mendukung agenda strategis nasional di bidang maritim.
- c. Dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait diplomasi maritim berbasis daerah.

1.4.3 Manfaat Akademis

- a. Menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik melakukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan pusat-daerah dalam diplomasi Indonesia.
- b. Memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya mengenai kontribusi aktor lokal dalam mendukung kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional

